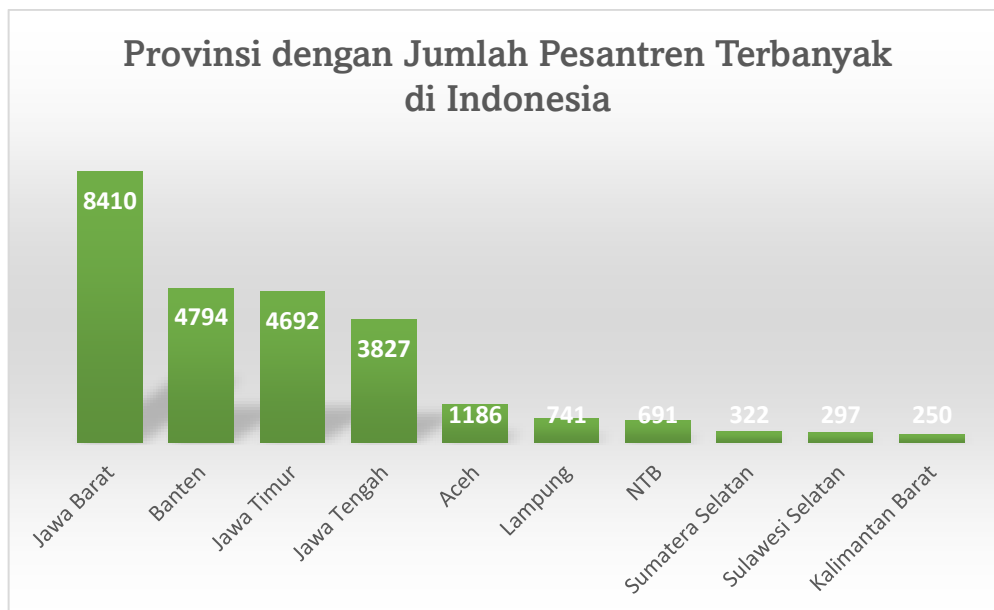


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Dhofier, 1994: 84). Dalam buku Pola Pembelajaran Pesantren, pondok pesantren didefinisikan sebagai sebuah lembaga Pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terjadi interaksi antara kiai dan ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil latar tempat yaitu masjid atau halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu (Departemen Agama, 2003: 3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah sebuah tempat belajar mengenai agama Islam yang di dalamnya terdapat beberapa unsur pendukung untuk memenuhi tujuan dari sebuah pesantren itu sendiri yang terkait dengan pembinaan pendidikan moral dan akhlak bagi para santri di dalamnya.

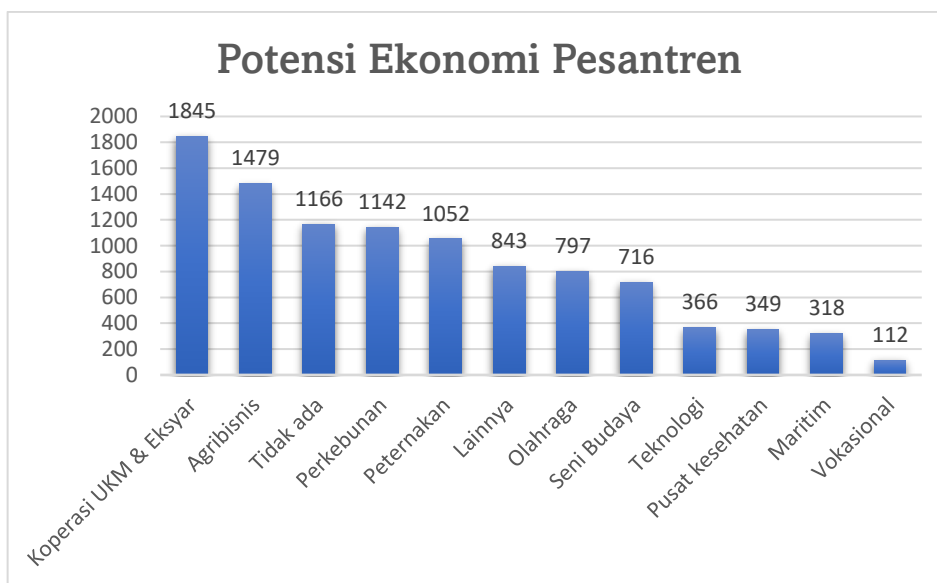
Saat ini, jumlah pondok pesantren di Indonesia cukup banyak. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa saat ini jumlah pondok pesantren di Indonesia sebanyak 27.722 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 4.175.531. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia ini tersebar di berbagai pulau. Pada gambar I.1 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat berada pada urutan pertama terkait provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia, yaitu 30,33% dari total pesantren nasional atau sekitar 8.410 pesantren. Lalu pada urutan kedua terdapat Provinsi Banten dengan total 4.794 pesantren dan pada urutan ketiga terdapat Provinsi Jawa Timur dengan total 4.692 pesantren.



Gambar I. 1 Jumlah Pesantren di Indonesia

(Sumber: PDPP Kementerian Agama, 2022)

UU No.18 Tahun 2019 pasal 4 tentang pesantren menjelaskan bahwa pesantren memiliki tiga ruang lingkup fungsi yang di antaranya yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang ingin menggali ilmu dalam bidang keagamaan. Selain itu juga, pesantren dapat menjadi pusat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Namun sebagai upaya pemberdayaan masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi, sebuah pesantren memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan kemandirian ekonomi dari pesantrennya. Data dari PDPP Kementerian Agama menunjukkan bahwa terdapat 10.185 pesantren yang telah memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi pesantren di berbagai bidang, yang sebarannya dapat dilihat di gambar I.2. Jumlah tersebut hanyalah 36,73% dari total pesantren yang ada di Indonesia. Sehingga artinya bahwa 63,27% lainnya belum memiliki unit usaha pesantren. Beberapa pesantren memang tidak terlalu fokus pada pengembangan ekonominya, namun aspek tersebut penting untuk menunjang kemandirian dari sebuah pesantren.



Gambar I. 2 Potensi Ekonomi Pesantren

(Sumber: PDPP Kementerian Agama, 2022)

Pada tahun 2020 Direktorat Pangkalan Data Pondok Pesantren mulai menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren dengan meminta bantuan dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Kebudayaan melalui penyebaran *google form* terhadap semua pesantren di Indonesia yang digunakan sebagai instrumen untuk pemetaan ulang pesantren. Dalam waktu dua bulan terdapat 6.000 pesantren yang mengisi *google form* tersebut, dan didapatkan hasil mengenai empat tipologi ekonomi pesantren berdasarkan jumlah usaha seperti pada Tabel I.1.

Tabel I. 1 Tipologi Ekonomi Pesantren Berdasarkan Jumlah Usaha

(Sumber: Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama, 2020)

| No | Kategori Jumlah Usaha | Persentase | Jumlah |
|----|---------------------------|------------|--------|
| 1 | > 5 unit usaha | 5% | 300 |
| 2 | 3 - 5 unit usaha | 26% | 1560 |
| 3 | 1 - 2 unit usaha | 54% | 3240 |
| 4 | Belum memiliki unit usaha | 15% | 900 |

Dalam mendukung upaya-upaya kemandirian sebuah pesantren, Pemerintah mengeluarkan beberapa program untuk menjawab permasalahan yang dimiliki oleh pesantren terkait dengan bantuan usaha ataupun modal. Kementerian Agama meluncurkan sebuah program yaitu inkubasi bisnis pesantren dengan bentuk berupa

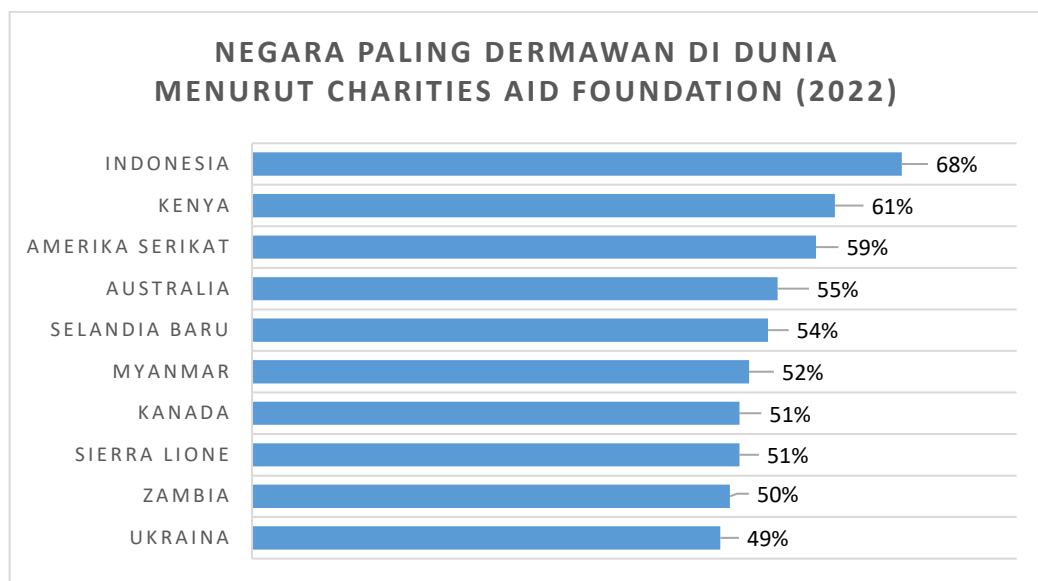
pemberian bantuan modal usaha. Pada tahun 2022, Kementerian Agama menjelaskan bahwa dana bantuan akan diberikan kepada 500 pesantren yang telah mengajukan proposal dan lolos dalam tahapan seleksi. Jumlah pesantren yang akan mendapatkan bantuan usaha masih jauh dari total jumlah pesantren yang ada di Indonesia yaitu sebesar 27.722 pesantren. Selain itu juga, bantuan tersebut tidak hanya difokuskan kepada pesantren yang belum memiliki unit usaha melainkan pesantren yang sudah memiliki unit usaha pun masih dapat menerima bantuan tersebut (Kemenag, 2022).

Bank Indonesia juga memiliki program pemberdayaan ekonomi pesantren. Bagi Bank Indonesia, hal ini sejalan dengan salah satu misi yang diemban oleh Bank Indonesia yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Bank Indonesia memiliki program peningkatan kapasitas usaha pesantren dan juga menginisiasi dibentuknya HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) yang merupakan sebuah wadah untuk menguatkan kemandirian pesantren yang berfokus pada penguatan ekonomi dari unit usaha yang ada di pondok pesantren. Kegiatan tersebut selain dapat menguntungkan ekonomi pesantren tetapi juga dapat memberikan ilmu atau bekal mengenai kewirausahaan bagi para pelaku usaha yaitu para santri yang ada didalamnya.

Dari data yang telah disampaikan, terlihat bahwa meski sudah ada beberapa program dari pemerintah dan Bank Indonesia, ada cukup banyak pesantren yang belum memiliki unit usaha, dengan salah satu masalah utamanya yaitu kurangnya dana atau modal. Tidak adanya modal membuat beberapa pesantren kesulitan membangun unit usaha, utamanya dalam memenuhi sarana produksi dari unit usaha yang akan dibangun. Sehingga beberapa pesantren membutuhkan adanya bantuan modal dari pihak-pihak eksternal. Selain itu juga beberapa pesantren membutuhkan akses atau *networking* yang lebih luas untuk menghubungkan pesantren dengan pihak eksternal. Dalam hal ini pihak eksternal termasuk institusi pemerintah, masyarakat, dan lain-lain (Mursyid, 2011).

Dikarenakan membutuhkan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka kondisi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat pun perlu untuk dipahami.

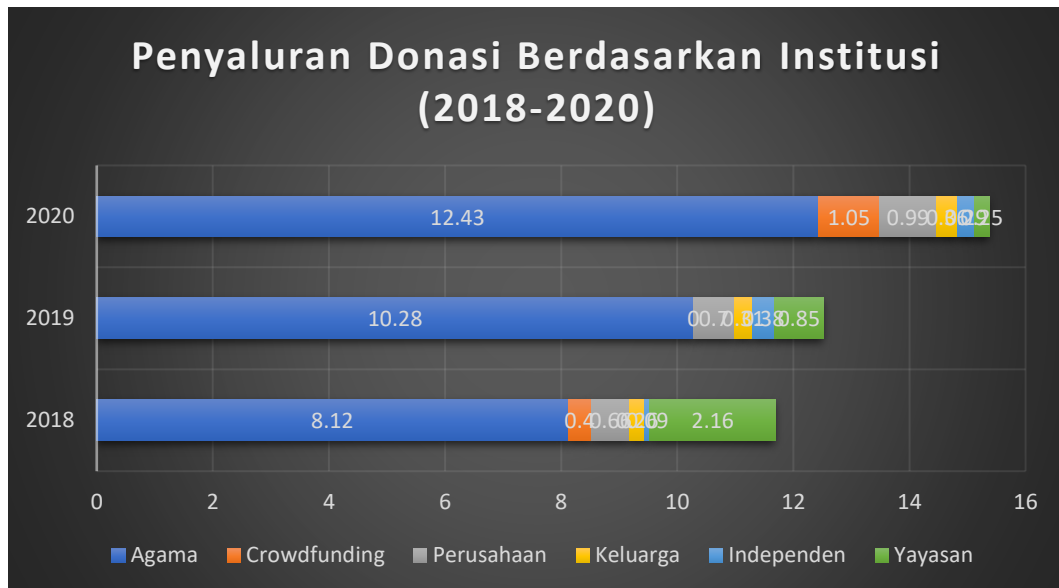
Pada tahun 2022, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan pada daftar World Giving Index 2022 yang dikeluarkan oleh badan amal *Charities Aid Foundation*, dapat dijelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dengan total skor sebesar 68% yang mana memiliki rincian yaitu pada dimensi membantu orang asing menempati peringkat 76 sedangkan untuk dimensi donasi uang dan tingkat kerelawanan, Indonesia menempati peringkat pertama.



Gambar I. 3 Negara Paling Dermawan di Dunia Tahun 2022

(Sumber: Databoks Katadata, 2022)

Indonesia berada pada peringkat pertama dengan dimensi yang menunjang yaitu salah satunya adalah donasi. Hal ini sejalan dengan laporan Outlook Filantropi 2022 yang mengungkapkan bahwa penyaluran dana filantropi tahun 2020 meningkat sebesar 23,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar I.4 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir penyaluran dana paling banyak ditujukan kepada institusi agama. Jumlah penyaluran donasi kepada instusi agama pada tahun 2020 sebesar Rp 12,43 triliun. Angka ini bahkan melonjak sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, penyaluran donasi terbanyak kedua pada tahun 2020 yaitu kepada *crowdfunding* sebesar Rp 1,05 triliun.



Gambar I. 4 Penyaluran Donasi Berdasarkan Institusi (2018-2020)

(Sumber: Databoks Katadata, 2022)

Berdasarkan data yang dipaparkan pada gambar I.4, dapat dilihat bahwa minat masyarakat Indonesia dalam berdonasi tergolong tinggi. Khususnya pada institusi agama. Sehingga untuk menjawab permasalahan dari beberapa pesantren mengenai modal usaha ataupun bantuan dalam memenuhi sarana produksi dapat dilakukan dengan adanya donasi dari masyarakat. Namun dalam hal ini, pengetahuan atau informasi mengenai pesantren-pesantren mana saja yang membutuhkan bantuan tersebut tidak dapat terjangkau dengan baik oleh masyarakat. Akibatnya membuat masyarakat kurang berfokus pada bantuan terkait pemenuhan sarana produksi dari pengembangan unit usaha pesantren. Dengan ini masyarakat membutuhkan akses untuk mewadahi informasi tersebut agar masyarakat dapat berdonasi dengan tujuan yang terarah dan bermanfaat.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa terdapat peluang untuk menghubungkan pesantren-pesantren yang ingin meningkatkan kemandirian ekonominya melalui pengembangan unit usaha yang tidak terjangkau oleh pemerintah dengan masyarakat yang ingin membantu dan memiliki minat tinggi dalam berdonasi melalui aplikasi wakaf. Menurut UU No.41 Tahun 2004 pasal 5 tentang wakaf, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa wakaf adalah

sebuah kegiatan dimana seseorang menyerahkan harta yang tetap ada wujudnya dan manfaat dari harta tersebut tidak akan hilang dari waktu ke waktu atau dalam jangka panjang. Pemilihan wakaf dibandingkan dengan instrumen ekonomi Islam lainnya dikarenakan wakaf memiliki pengertian yang sesuai dengan tujuan dari pemenuhan sarana produksi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pesantren dapat menggunakan wakaf produktif yang mana yaitu sebuah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan adanya wakaf produktif ini dapat mendatangkan nilai positif bagi aspek ekonomi dan juga kesejahteraan pesantren.

Pada era 4.0 yang semakin modern dengan perkembangan teknologinya, aplikasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghubungkan antara masyarakat yang ingin berdonasi dengan pesantren selaku penerima manfaat wakaf. Adanya aplikasi wakaf akan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan amal berupa wakaf. Saat ini, terdapat beberapa pilihan aplikasi wakaf yang sudah tersedia. Contohnya yaitu Wakaf Plus dan Mobile Wakaf Uang NU. Namun, kedua aplikasi belum dapat memenuhi kebutuhan pesantren mengenai sarana produksi untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki. Aplikasi Wakaf Plus memiliki beberapa program wakaf namun program tersebut tidak terlalu berfokus dalam pemenuhan sarana produksi. Selain itu juga, aplikasi Wakaf Plus belum memiliki ulasan dari penggunaannya. Oleh karena itu, ada peluang dalam membangun bisnis aplikasi wakaf ini, dan perlu dilakukan perancangan lebih lanjut dengan menggunakan model bisnis agar aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kepentingan pelanggan.

Untuk mengembangkan aplikasi tersebut, maka perlu dirancang terlebih dulu model bisnisnya. Model bisnis dapat membantu menggambarkan bisnis yang akan dijalankan menjadi lebih jelas. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), model bisnis adalah sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran mengenai cara bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai (ekonomi, sosial, budaya, dan bentuk nilai lainnya). Model bisnis menjelaskan mengenai perspektif alternatif dalam mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan dapat menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta dapat mengubah

pemasukan menjadi keuntungan (McQuillan dan Scott, 2015). Oleh karena itu, perancangan model bisnis diperlukan untuk dapat memenuhi keinginan *customer* agar bisnis berjalan dengan baik dan memperoleh manfaat yang diinginkan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana model bisnis aplikasi wakaf sarana produksi untuk usaha pesantren jika dirancang dengan menggunakan metode *lean canvas*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi wakaf sarana produksi untuk usaha pesantren dengan menggunakan metode *lean canvas*.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Dapat memberikan usulan model bisnis bagi aplikasi wakaf sarana produksi untuk usaha pesantren.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk masa yang akan datang.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, di dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai alasan pemilihan metode penyelesaian masalah.

BAB III METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH

Bab ini menjelaskan mengenai metode dalam melakukan penelitian serta menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penelitian. Di bagian awal dimuat penjelasan mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, yang akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai mekanisme pengumpulan data, tahap perancangan model bisnis, serta proses verifikasi dan validasi hasil rancangan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PERANCANGAN MODEL BISNIS

Bab ini menjelaskan mengenai pengumpulan dan pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan serta dilanjutkan dengan perancangan model bisnis,

BAB V ANALISIS HASIL DAN EVALUASI PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan mengenai proses verifikasi, perancangan mock-up aplikasi untuk melakukan validasi, proses validasi, analisis dan evaluasi hasil perancangan yang telah dilakukan. Selain itu juga, akan disampaikan mengenai rencana implementasi.

BAB VI KESIMPULAN & SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil perancangan dan saran yang diberikan untuk ke depannya